



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG RENCANA AKSI TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun 2026.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor SP DIPA-076/01.2.657363/2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 7 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Galih Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2026

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
1	Manajemen Perubahan	Perencanaan reformasi birokrasi	Pembentukan tim reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Keputusan tim reformasi birokrasi tahun 2026	Januari
			Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pejabat dan pegawai	Kegiatan <i>kick off</i> /pembangunan komitmen	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental	pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	
		Pelaksanaan manajemen perubahan	Pembahasan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Jepara	Januari
			Sosialisasi reformasi birokrasi melalui berbagai media	Tersedianya media sosialisasi reformasi birokrasi di lingkungan kerja yang bisa diakses <i>stakeholder</i> internal dan eksternal	Januari
				Pembangunan kolom reformasi birokrasi satuan kerja di <i>website</i> resmi	Januari
				Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu	Januari
			Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara pemilu dan ASN	Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			Penyelenggaraan integritas di lingkungan kerja	Persentase penandatanganan pakta integritas Anggota KPU dan ASN	Januari
				Persentase pelaporan LHKPN	Januari-Maret
				Dokumen laporan penanganan benturan kepentingan beserta dokumentasi surat pernyataan bebas benturan kepentingan	Januari
				Deklarasi pencahangan zona integritas satuan kerja	Januari
		Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di satuan kerja		Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan satuan kerja	Januari
				Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian	
			Pembangunan instrumen <i>reward and punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	Tersedianya instrumen <i>reward and punishment</i> di lingkungan satuan kerja	Januari
				Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan satuan kerja	Januari
			Melakukan monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan kerja	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi	Juli, Desember
			Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) unit	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan kerja	Januari-Februari
				Terisinya LKE unit	Januari-Februari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			Melakukan pelaporan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan kerja	Terlaksananya penyampaian laporan kepada KPU RI/KPU provinsi	Januari-Februari
				Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi serta pelaksanaan yang sudah ditindaklanjuti dari evaluasi sebelumnya	Januari-Februari
			Pemetaan produk hukum di lingkungan satuan kerja	Adanya data produk hukum di lingkungan satuan kerja	Januari-Desember
			Penyusunan revisi produk hukum	Jumlah produk hukum yang telah direvisi	Januari-Desember
2	Deregulasi Kebijakan	Merumuskan berbagai produk hukum baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan produk hukum yang diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang di lingkungan satuan kerja	Jumlah produk hukum yang telah disahkan	Januari-Desember
		Pengelolaan JDIH	Pembangunan JDIH	Dapat diaksesnya JDIH satuan kerja	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
3	Penataan Organisasi/Kelembagaan	Evaluasi Organisasi	Pengelolaan JDIH	Updatenya JDIH satuan kerja	Januari-Desember
			Pengisian kuesioner evaluasi organisasi	Pelaporan kuesioner evaluasi organisasi kepada KPU RI/KPU provinsi	Januari-Februari
		Penyesuaian SOTK	Penyesuaian SOTK satuan kerja sesuai mandat	SOTK satuan kerja sesuai mandat	Januari-Desember
			Pembuatan dokumen struktur organisasi unit/satuan kerja	Struktur organisasi unit/satuan kerja	Januari
4	Penguatan Tatalaksana	Peningkatan tatalaksana proses bisnis serta SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Penyusunan peta proses bisnis dan SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis	Januari-Desember
				Tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				Peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	Januari-Desember
				Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja	Januari-Desember
			Evaluasi proses bisnis di lingkungan unit/satuan kerja	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi	Januari-Desember
			Penyusunan SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level) ke dalam SOP	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP	Januari-Desember
				SOP sudah dilegalkan	Januari-Desember
				Seluruh SOP telah diterapkan	Januari-Desember
			Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti	Januari-Desember
		Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik	Tata kelola PPID di lingkungan unit/satuan kerja	Adanya kebijakan pendukung PPID	Januari-Desember
				Dapat diaksesnya maklumat layanan, standar pelayanan, dan SOP terkait permohonan informasi oleh <i>stakeholder</i>	Januari-Desember
				Meningkatnya kepuasan layanan PPID	Januari-Desember
				Jumlah permohonan masuk, sedang diproses dan sudah	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				sudah selesai ditindak lanjuti	
				Jumlah sengketa informasi	Januari-Desember
				Adanya rekomendasi/pelaksanaan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan PPID	Juli, Desember
				Indeks kepuasan permohonan informasi	Januari-Februari
		Tata kelola dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan unit/satuan kerja	Tata kelola SPBE di lingkungan unit/satuan kerja	Kebijakan internal tata kelola SPBE	Januari-Desember
				Kebijakan internal layanan SPBE (SOP)	Januari-Desember
				Dimanfaatkannya aplikasi yang dibangun, memiliki proses bisnis dan SOP	Januari-Desember
				Besaran anggaran belanja TIK di lingkungan unit/satuan kerja	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				Jumlah aplikasi terintegrasi di lingkungan unit/satuan kerja	Januari-Desember
				Jumlah aplikasi berbagi pakai yang dimanfaatkan	Januari-Desember
			Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan	Jumlah dan jenis naskah dinas yang sudah dimanfaatkan	Januari-Desember
				Data pemanfaatan aplikasi manajemen kepegawaian.	Januari-Desember
				Terisinya data aplikasi manajemen perencanaan	Januari-Desember
				Terisinya data aplikasi penganggaran	Januari-Desember
				Terisinya data aplikasi manajemen keuangan	Januari-Desember
				Terisinya aplikasi manajemen kinerja	Januari-Desember
				Persentase pengadaan melalui aplikasi pengadaan	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			Pemanfaatan aplikasi SPBE administrasi kesekretariatan	Dapat diaksesnya aplikasi pengaduan oleh publik, SOP dan jumlah pengadu/laporan	Januari-Desember
				Aplikasi dokumentasi informasi hukum di lingkungan satuan kerja (JDIH) yang selalu diperbaharui	Januari-Desember
				Dapat diaksesnya WBS oleh <i>stakeholder</i> , SOP dan jumlah pelapor/laporan pengaduan	Januari-Desember
				Jumlah aplikasi kepemiluan yang dimanfaatkan	Januari-Desember
				Data pengunjung bagi aplikasi yang bisa diakses publik	Januari-Desember
				Indeks survei kepuasan publik terhadap aplikasi	Januari-Februari
				Jumlah pemohon melalui aplikasi PPID satuan kerja	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				oleh publik	
		Penerapan sistem kearsipan yang handal	Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis, dinamis, manual dan digital di lingkungan unit/satuan kerja	Januari-Desember
				Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit/satuan kerja sama dengan Kantor Arsip Daerah	Januari-Desember
				Terdokumentasinya arsip vital	Januari-Desember
5	Penguatan sistem manajemen SDM ASN	Pembangunan sistem merit	Penerapan pengukuran kinerja individu	Seluruh pegawai memiliki sasaran kinerja pegawai	Januari
				Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output/mutu/waktu/biaya)	Januari-Desember
				Sasaran Kinerja Pegawai mendukung sasaran strategi dan pencapaian kinerja secara	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				berjenjang/ <i>cascading</i>	
				Pengukur periodik sasaran kinerja individu	Januari, April, Juli, Oktober
				Adanya evaluasi dan pelaksanaan hasil evaluasi SKP	Januari, April, Juli, Oktober
				Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i>	Agustus
			Penerapan <i>assesment</i> untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	Data mutasi	Januari
				Data promosi	Januari
				Data peserta <i>assesment</i>	Januari
			Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggara pemilu	Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	Januari
				Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya yang sudah diberikan sanksi/hukuman	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			Perencanaan kebutuhan/penambahan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN menggunakan analisa beban kerja (ABK)	Tersedianya dokumen analisis beban kerja	Januari
			Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja	Januari
				Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Januari
			Implementasi standar kompetensi jabatan	Setiap jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan	Januari
			Pengisian Sistem Informasi Kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit/satuan kerja.	Januari-Desember
	Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah dan jenis jabatan fungsional yang mendukung unit dan satuan kerja	Januari-Desember	

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Penyusunan dan penetapan Renstra satuan kerja	Renstra satuan kerja	Januari-Februari
			Reviu Renstra satuan kerja	Renstra hasil reviu	Januari-Februari
			Penetapan kinerja dengan menerapkan <i>reward and punishment</i>	Adanya dokumen penetapan kinerja hingga level eselon IV	Januari
				Persentase capaian kinerja merupakan unsur pemberian <i>reward and punishment</i>	Januari, April, Juli, Oktober
				Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (kerangka logis kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Januari, April, Juli, Oktober
			Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi	Januari-Desember
				Persentase sasaran kinerja yang tercapai 100% atau lebih	Januari-Desember
				Persentase anggaran yang	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				berhasil di- <i>refocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	
				Jumlah anggaran total	Januari-Desember
				Jumlah anggaran yang berhasil di- <i>refocussing</i>	Januari-Desember
			Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Adanya aplikasi terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Januari-Desember
			Pengukuran capaian kinerja unit/satuan kerja	Persentase capaian kinerja unit/satuan kerja	Januari-Desember
			Evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja	Adanya rencana tindak lanjut dan pelaksanaan tindak lanjut evaluasi capaian kinerja unit/satuan kerja	Januari-Desember
				Reviu LKj unit/satuan kerja	Januari-Februari
			Pelaporan kinerja unit/satuan kerja	Pelaporan kinerja unit/satuan kerja tepat waktu	Januari-Februari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi SAKIP	Terisinya aplikasi SAKIP	Januari-Desember
				Data SAKIP unit/satuan kerja termutakhir	Januari-Desember
			Pelatihan SDM pengelola akuntabilitas kinerja	Persentase jumlah pegawai pengelola akuntabilitas kinerja yang memperoleh pelatihan	Januari-Desember
				Pengelola PPBJ bersertifikat	Januari-Desember
			Pembangunan jabatan fungsional yang terkait dengan akuntabilitas kinerja	Persentase pegawai yang berstatus JF tata kelola pemilu	Januari
7	Penguatan Pengawasan	Pembangunan zona integritas di unit/satuan kerja	Perencanaan zona integritas di lingkungan unit/satuan kerja	Terbentuknya tim zona integritas	Januari
			Penyusunan rencana aksi zona integritas di lingkungan unit/satuan kerja	Ditandatangani pakta integritas oleh para pihak	Januari
				Masuknya unit kerja/satuan kerja dalam penilaian WBK/WBBM	Januari
				Adanya rencana kerja zona	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				integritas yang sudah dilegalkan	
			Pelaksanaan rencana aksi zona integritas	Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 area zona integritas di dalam rencana aksi zona integritas tahun sebelumnya	Januari
				Persentase kegiatan yang terlaksana di dalam rencana aksi zona integritas tahun sebelumnya	Januari
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pembangunan zona integritas di lingkungan unit/satuan kerja	Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas tahun sebelumnya	Januari
				Persentase pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kerja pembangunan zona	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				integritas tahun sebelumnya	
				Melaporkan pembangunan zona integritas dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan	Januari
			Pengisian LKE zona integritas	Terisinya LKE zona integritas tahun sebelumnya	Januari
				Terisinya PMPRB zona integritas bagi unit/satuan kerja yang ditunjuk	Januari
		Pelaksanaan pengendalian gratifikasi KPU	Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan unit/satuan kerja	Januari
			Pembangunan komitmen dan diseminasi atas peraturan gratifikasi	Adanya alat sosialisasi di lingkungan unit/ satuan kerja	Januari
				Adanya sosialisasi gratifikasi di lingkungan unit/satuan kerja	Januari
				Tanda tangan komitmen anti gratifikasi di lingkungan	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				unit/satuan kerja	
			<i>Public campaign</i> antigratifikasi	Adanya alat sosialisasi antigratifikasi kepada <i>stakeholder</i> eksternal	Januari
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	Laporan pengendalian gratifikasi tahun sebelumnya	Januari
				Tindak lanjut pengendalian gratifikasi yang sudah dilaksanakan tahun sebelumnya	Januari
		Pelaksanaan <i>whistle blowing system</i> KPU	Pembangunan aplikasi <i>whistle blowing system</i> di lingkungan unit/satuan kerja	Tersedianya aplikasi WBS yang bisa diakses oleh publik	Januari
				Adanya SOP WBS	Januari
				Adanya pengelola WBS	Januari
			Pengelolaan WBS di lingkungan unit/satuan kerja	Prosentase pengaduan WBS selesai ditindaklanjuti tahun sebelumnya	Januari
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan WBS di	Laporan pengelolaan WBS di lingkungan unit/satuan kerja	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			lingkungan unit/satuan kerja	tahun sebelumnya	
		Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU	Identifikasi benturan kepentingan di lingkungan unit/satuan kerja	Potensi-potensi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dari pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit/satuan kerja	Januari
			Penandatanganan surat pernyataan benturan kepentingan di lingkungan unit/satuan kerja	Persentase penandatanganan surat pernyataan bebas benturan kepentingan	Januari
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut atas pengelolaan benturan kepentingan	Dokumen laporan monitoring, evaluasi pengelolaan benturan kepentingan	Januari
		Peningkatan SPIP di lingkungan unit/satuan kerja	Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Unit/Satuan Kerja	Adanya tim SPIP pada satuan kerja	Januari
			Pelaksanaan SPIP	Terselenggaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				serta pemantauan pengendalian intern	
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan SPIP	Pelaporan buku kendali tepat waktu	Januari-Desember
		Penanganan pengaduan masyarakat KPU	Pembangunan sistem pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Tersedianya sarana penyampaian pengaduan	Januari-Desember
				Adanya pejabat yang mengelola pengaduan	Januari
				Terdapat sistem mekanisme prosedur pengaduan	Januari
				Terdapat jangka waktu penyelesaian pengaduan	Januari
			Pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Prosentase pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti	April, Juli, Oktober, Desember
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengaduan masyarakat di lingkungan unit/satuan kerja	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian, hambatan dan	April, Juli, Oktober, Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat	
		Peningkatan integritas individu	Penyampaian LHKPN	Persentase seluruh wajib lapor LHKPN di lingkungan unit/satuan kerja	Januari-Maret
		Peningkatan akuntabilitas pengadaan barang/jasa	Pembangunan unit kerja pengadaan barang/jasa	Adanya struktur pengelola pengadaan barang/jasa di lingkungan unit/satuan kerja	Januari
			Pengelolaan pengadaan barang/jasa	Prosentase pelaksanaan pengadaan sesuai regulasi	Januari-Desember
			Monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengelolaan atas pengelolaan pengadaan barang/jasa	Laporan pengadaan barang/jasa	Januari-Desember
8	Pelayanan Publik	Penguatan pelayanan prima di lingkungan unit/satuan kerja	Memetakan jenis-jenis/produk-produk pelayanan administrasi internal kesekretariatan dan pelayanan eksternal (terkait kepemiluan)	Informasi jenis-jenis atau produk-produk layanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal	Januari-Desember
			Melakukan evaluasi terhadap jenis-	Pelaksanaan rekomendasi	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			jenis layanan baik internal dan eksternal terhadap 14 komponen standar pelayanan sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009	hasil evaluasi terhadap setiap jenis layanan internal dan eksternal/ upaya pemenuhan terhadap 14 komponen standar pelayanan (reviu dan perbaikan standar pelayanan)	
				Sudah adanya maklumat pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja	Januari-Desember
				Indeks kepuasan layanan yang didapat melalui survei pelayanan	April, Juli, Oktober, Desember
				Jumlah sengketa pelayanan tahun sebelumnya menurun	Januari
				Menurunnya jumlah pelanggaran kode etik ASN dan kode etik penyelenggara pemilu tahun sebelumnya	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
				Adanya akses pengaduan, konsultasi serta pengelolaan pengaduan masyarakat (jumlah pengaduan masuk, sedang proses dan selesai)	Januari-Desember
				Adanya inovasi pelayanan yang dirasakan manfaatnya oleh <i>stakeholder</i> internal dan/atau eksternal	Januari-Desember
			<i>Tools</i> evaluasi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017	Penilaian kinerja tahun sebelumnya	Januari
		Mendorong inovasi di sektor pelayanan kepemiluan dan administrasi di lingkungan	Menciptakan/Melakukan deregulasi pelayanan/menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan dalam hal kesesuaian persyaratan, kemudahan sistem, mekanisme, dan prosedur, kecepatan waktu	Indeks kepuasan layanan yang di dapat melalui survei pelayanan	April, Juli, Oktober, Desember
				Adanya regulasi/deregulasi kebijakan pelayanan	Januari-Desember
				Adanya SOP Pelayanan	Januari

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
		unit/satuan kerja	penyelesaian, kejelasan biaya/tarif, kualitas produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku petugas, kualitas sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan, saran dan masukan	Informasi kepada publik terkait biaya layanan	Januari-Desember
				Informasi jenis-jenis pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja baik kepada internal dan eksternal	Januari-Desember
				Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi	Januari-Desember
			Melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap inovasi layanan	Adanya rekomendasi dan tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya	Januari
				Dilaksanakannya rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya	Januari
			Upaya mendorong replika inovasi yang berdampak baik pada pelayanan ke unit kerja/satuan kerja	Adanya sosialisasi inovasi	Januari
				<i>Banchlearning</i> dari unit/satuan kerja lain terkait hasil inovasi	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
		Pembangunan zona hijau pelayanan publik	Membangun dan menerapkan variabel dan indikator zona hijau pelayanan publik	Tersedianya standar pelayanan sesuai amanat UU	Januari-Desember
			Standar pelayanan meliputi prasyarat layanan, sistem mekanisme prosedur, produk layanan, jangka waktu penyelesaian, serta biaya/tarif	Tersedianya maklumat pelayanan	Januari-Desember
			Sistem informasi pelayanan publik	Tersedianya sistem informasi pelayanan publik yang dapat diakses publik	Januari-Desember
			Sarana prasarana dan fasilitas	Tersedianya sarana prasarana dan fasilitas pelayanan yang layak	Januari-Desember
			Pelayanan khusus	Tersedianya pelayanan khusus berupa sarana dan layanan sarana khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
			Pengelolaan pengaduan	Tersedianya sarana pengaduan berikut prosedur, petugas dan dokumentasi pengaduan	Januari-Desember
			Penilaian kinerja berupa sarana pengukuran kepuasan langganan dan survei pelayanan	Tersedianya survei dan sarana pengukuran kinerja serta indeks hasil pengelolaannya;	Januari-Desember
			Visi misi dan motto pelayanan	Tersedianya visi, misi dan moto pelayanan	Januari-Desember
			Atribut pelayanan berupa kartu identitas petugas, buku tamu, petunjuk dan arah ruang layanan	Atribut layanan dapat terlihat publik	Januari-Desember
			Pelayanan terpadu satu pintu	Tersedianya pelayanan satu pintu di lingkungan unit/satuan kerja;	Januari-Desember
		Penerapan partisipasi publik dalam	Pembangunan kerja sama	Terlaksananya penandatanganan kerja sama dengan pihak terkait	Januari-Desember

No.	Area Perubahan	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Pelaksanaan (Bulan)
		layanan publik	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu	Terlaksananya sosialisasi dan pendidikan pemilih	Januari-Desember
		Penerapan <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pelayanan publik	Pembangunan dan pelaksanaan <i>reward and punishment</i> dalam pelayanan internal dan eksternal	Adanya pemberian <i>reward and punishment</i>	Agustus

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

RIS ANDY KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

